BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia menuangkan geopolitik dalam suatu doktrin nasional yang disebut wawasan nusantara dengan politik luar negeri yang bebas aktif, dan geostrategi diwujudkan menjadi suatu konsep ketahanan nasional (kesatuan deologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan). Pengelolaan kelautan dan kemaritiman harus disikapi dan dilaksanakan secara komprehensif, termasuk di dalamnya keamanan nasional di laut. Dalam membangun negara maritim diperlukan suatu kebijakan kelautan nasional dalam hal ini kebijakan diplomasi maritim. Kebijakan diplomasi maritim sudah dilaksanakan sejak perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas konsep Negara Kepulauan *(archipelagic state)* melalui Deklarasi Djuanda 1957. Deklarasi Djuanda tahun 1957 telah memberikan harapan baru untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim dengan kebijakan diplomasi maritim. Hal tersebut terjadi karena Indonesia menggunakan strategi geopolitik sebagai alat yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan kelautan di Indonesia. Adapun faktor mempengaruhinya yaitu kepentingan nasional, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang digolongkan menjadi faktor internal. Sedangkan faktor eksternal dari pengaruh geopolitik terhadap kebijakan kelautan di Indonesia adalah perbatasan dengan negara lain dan dinamika perkembangan politiksecara global.

B. Saran

Sebelumnya, kebijakan nasional Indonesia seringkali dimaknasi sebagai negara yang kehilangan identitas diri. Paradigma pembangunan nasional yang dilakukan selama ini masih berorientasi kepada daratan *(Land Base Oriented Developement)* dan jauh dari orientasi kelautan *(Sea Base Oriented Developement* (Sulistyaningtyas, 2015). Seiring dengan fenomena bergesernya pusat gravitasi politik dan ekonomi dunia dari samudera Atlantik

ke Pasifik, maka berubah pula arsitertur geopolitik regional. Salah satu indikasinya adalah semakin terpusatnya medan pertarungan negara-negara besar ke kawasan Indo-Pasifik. Perpindahan kekuatan ekonomidunia ke Asia akan meningkatkan frekuensi perdagangan dan perlintasan kapal melalui Indonesia, sehingga peran strategis Indonesia dalam persaingan global akan semakin meningkat. Geopolitik memiliki hubungan dan pengaruh yang sangat kuat terhadap kebijakan kelautan di Indonesia dalam hal diplomasi maritim, maka dalam penelitian penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus menjamin efektifitas terkait kebijakan kelautan di Indonesia, salah satunya dalam diplomasi maritim sebagai perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun bangsa aspek sosial.
2. Pemerintah harus berusaha mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan UUD 1945 terkait dengan kebijakan kelautannya dalam hal ini kebijakan diplomasi maritim.